

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian.....	12
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4 Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum	15
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis	15

BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2.1	Otonomi Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	17
2.2	Pengawasan Terhadap Peraturan Desa	25
2.3	Perkembangan Kedudukan Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	33
2.4	Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	43

BAB III IMPLIKASI DARI ADANYA PENGAWASAN PERATURAN DESA TERHADAP HAK OTONOMI DESA

3.1	Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	64
3.2	Pembatasan Kewenangan Dalam Peraturan Desa	74
3.3	Pengujian Peraturan Desa Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	81
3.4	Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Bagi Wujud Otonomi Daerah	83
3.5	Model Pengujian Peraturan Desa	91
	a. Eksekutif Review	92
	b. Judicial Review	104

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

GAMBAR

1. Tabel 1: Pembatasan Kewenangan Pembentukan Peraturan Desa80
2. Bagan 1 : Tata Cara Evaluasi Rancangan Perdes.....101
3. Bagan 2 : Tata Cara Klarifikasi Perdes102
4. Bagan 3 : Alur Mekanisme Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung.....109
5. Tabel 2 : Perbedaan Pengujian Perdes antara Pemerintah dan MA.....111



DAFTAR SINGKATAN



UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Permendes:	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Perdes	: Peraturran Desa
MA	: Mahkamah Agung
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
LMD	: Lembaga Musyawarah Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BUMDes	: Badan Usaha MilikDesa